

---

---

## **STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**Aos Kuswandi<sup>1)</sup>**

<sup>1</sup> Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam 45. Jalan Cut Meutia 83, Kota Bekasi 17113, Jawa Barat, Indonesia.

E-mail: [aos\\_kuswandi@unismabekasi.ac.id](mailto:aos_kuswandi@unismabekasi.ac.id) Telp: +628561900653

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menjelaskan strategi pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan fokus pada : identifikasi potensi pariwisata, kawasan dan destinasi pariwisata unggulan; identifikasi permasalahan pariwisata; dan strategi pemerintah daerah untuk mencapai keberhasilan pembangunan pariwisata. Penelitian menggunakan metode deskriptif analisis . Data dikumpulkan melalui studi literatur dan studi dokumentasi. Data diperoleh dari data sekunder melalui jejak internet berbasis website Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Lembaga terkait lainnya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *pertama*, Provinsi Nusa Tenggara Barat mampu mencapai keberhasilan pembangunan pariwisata melalui strategi identifikasi potensi pariwisata; penetapan destinasi pariwisata unggulan; penetapan kawasan strategi pariwisata daerah; dan perumusan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah; Rencana Strategi Kepariwisataaan Dinas Pariwisata dan Rencana Kinerja Dinas Pariwisata, *kedua*, sistem perencanaan pembangunan kepariwisataan dirumuskan berjenjang, sinergi dan melibatkan multi stakeholders, *ketiga*, pembangunan pariwisata berkelanjutan melalui merubah desa miskin menjadi desa wisata, *keempat*, melakukan pembangunan prasarana dan sarana pendukung pariwisata; pemasaran melalui promosi pariwisata; menjalin kemitraan; peningkatan kualitas sumberdaya manusia kepariwisataaan; peningkatan jumlah dan kualitas atraksi pariwisata.

**Kata kunci:** Strategi Pemerintah Daerah; Pembangunan Pariwisata; Kawasan Strategis Pariwisata Daerah; Destinasi Pariwisata.

### **Abstract**

*This study aims to explain the local government's strategy in tourism development in East Nusa Tenggara Province, with a focus on: identifying tourism potential; leading tourism areas and destinations; identification of tourism problems; and local government strategies to achieve successful tourism development. This research uses descriptive analysis method. Data were collected through literature studies and documentation studies. Data obtained from secondary data through internet footprints based on the website of the West Nusa Tenggara Provincial Government and other related institutions. The results of the study concluded that first, West Nusa Tenggara Province was able to achieve the success of tourism development through a tourism potential identification strategy; determination of leading tourism destinations; stipulation of regional tourism strategy areas; and formulation of Regional Tourism Development Master Plans; The Tourism Office's*



**JURNAL AGREGASI**  
**Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam**  
**Demokrasi**  
**Volume 8–Nomor 2, Desember 2020**



DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3817](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3817)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

---

*Strategic Plan and the Tourism Office's Performance Plan, second, the tourism development planning system is formulated in stages, synergies and involves multi-stakeholders; third, sustainable tourism development through changing poor villages into tourist villages; fourth, developing tourism infrastructure and supporting facilities; marketing through tourism promotion; establish partnerships; improving the quality of tourism human resources; increasing the number and quality of tourism attractions.*

**Keywords:** *Local Government Strategy; Tourism Development; Regional Tourism Strategic Areas; Tourism Destinations.*

DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3817](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3817)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

## PENDAHULUAN

Urusan pemerintahan bidang pariwisata dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 12 ayat (3) merupakan urusan pilihan. Sedangkan urusan pilihan ini merupakan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren, Artinya urusan tersebut dibagi menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Lebih lanjut urusan pemerintahan konkuren menjadi dasar dalam penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. (Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2014).

Urusan pariwisata sebagai urusan konkuren pada Pemerintah Daerah Provinsi, maka Daerah yang memiliki potensi pariwisata unggulan dan baik untuk dikembangkan, merupakan tuntutan bagi Daerah untuk mengoptimalkan potensi tersebut. Pembangunan kawasan pariwisata yang menjadi tujuan destinasi wisata unggulan di berbagai daerah merupakan agenda penting bagi pemerintah daerah yang memiliki potensi pariwisata alam. Berbagai sumberdaya pariwisata yang dimiliki perlu dilestarikan sesuai dengan keadaan di lapangan dan potensi yang dimiliki daerah. Strategi kebijakan pengembangan pariwisata merupakan hal penting dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Kebijakan pembangunan kawasan pariwisata yang efektif diperlukan. Kebijakan dibuat secara jelas dan mampu mengatasi masalah. Kebijakan yang efektif

dilihat dari kemampuannya dalam menjawab kepentingan dan keinginan masyarakat setempat, lingkungan wilayah dan sosial budaya, para investor baik dalam negeri maupun luar negeri dan wisatawan (Conlin dan Baum dalam Wirawan, 2009). Kemampuan pemerintah daerah dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan strategis dalam pengembangan pariwisata daerah.

Pembangunan pariwisata merupakan jenis pembangunan yang multidimensional. Jenis pembangunan ini memiliki dampak pengganda (*multiplier effect*) yang relatif besar. Sektor pariwisata dapat menopang untuk berkontribusi bagi penerimaan pendapatan negara maupun daerah.

Ditetapkannya Nusa Tenggara Barat sebagai “Pintu Gerbang Pariwisata Nasional” menjadikan Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu destinasi pariwisata unggulan di Indonesia. Ia akan diperhitungkan dan memiliki daya saing.

Jumlah wisatawan di NTB mengalami kenaikan setiap tahunnya. Baik wisatawan asing maupun wisatawan nusantara dalam kurun waktu 2013-2017, rata-rata meningkat sebesar 25.16% (Renstra NTB 2019-2023, 2020).

Perkembangan pariwisata baik di Indonesia maupun di berbagai negara dunia berdampak positif bagi peningkatan kehidupan ekonomi. Oleh karenanya, pariwisata menjadi salah satu sektor yang diharapkan dapat memperkuat

DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3817](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3817)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

perekonomian Indonesia. Berkembangnya pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan penerimaan devisa negara (Mulyana, 2012). Jelas, pariwisata merupakan bidang penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan pemerintah daerah untuk dikembangkan.

Pengembangan pariwisata di NTB ini berdampak pada peningkatan jumlah baik Wisman maupun wisatawan domestik. Dalam tiga tahun terakhir 2017-2019, jumlah kunjungan wisatawan dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 1. Jumlah Wisatawan NTB Dalam Tahun 2017-2019**

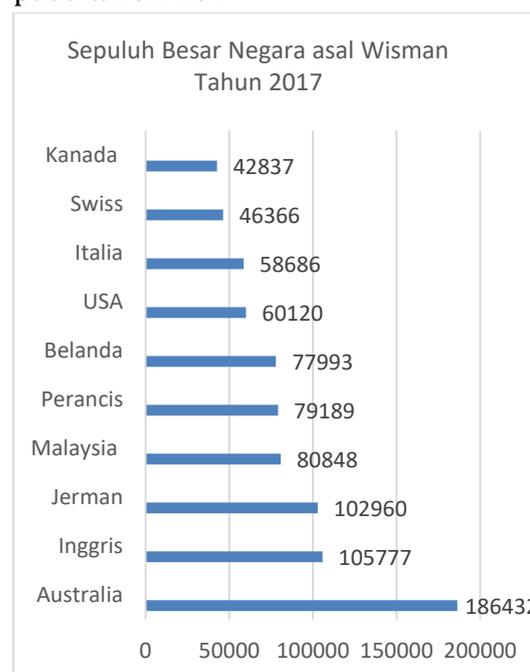
Kategori	Jumlah wisatawan (orang)		
	2017	2018	2019
wisman	1.430.249	2.204.556	1.550.791
wisnus	2.078.054	1.607.823	2.155.561
Total	3.508.903	2.812.379	3.706.352

Sumber: Dinas Pariwisata NTB, 2020.

Nampak bahwa dalam tiga tahun terakhir secara keseluruhan ada penambahan jumlah orang yang berkunjung ke NTB, walau pada tahun 2019, jumlah wisman menurun. Penurunan wisman pada tahun tersebut tidak berpengaruh pada total jumlah wisatawan. Secara keseluruhan, jumlah wisatawan yang berkunjung ke NTB mengalami peningkatan.

Adanya peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke NTB seperti dalam tabel 1 di atas, menghendaki

keseriusan pemerintah daerah Provinsi NTB untuk menata dan mengembangkan pariwisata yang dimiliki. Hal ini penting dilakukan agar wisatawan kembali datang berwisata ke NTB sehingga pertumbuhan perekonomian masyarakat akan terus meningkat. Dengan demikian pembangunan pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Fathanah, 2018). Berikut Data sepuluh besar wisman yang berkunjung ke NTB pada tahun 2017:



Sumber: Buku Statistik Kepariwisata NTB, 2017.

**Gambar 1. Sepuluh Besar negara asal wisman tahun 2017**

Daya tarik dari NTB bagi wisatawan adalah karena keindahan pantainya, alam dan adat budaya masyarakatnya. Oleh karenanya dari wisatawan yang datang ke NTB mayoritas bertujuan untuk

DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3817](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3817)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

bersenang-senang, yaitu sebanyak 78,13%; 10,91% untuk berbisnis ; tujuan mengunjungi keluarga 6,73 %, dan sisanya sebanyak 4.23 % untuk tujuan lainnya ( Buku Statistik Kepariwisata NTB, 2017).

Tingginya minat wisatawan untuk bersenang-senang di NTB menjadikan Pemerintah Daerah untuk terus menata dan mengembangkan destinasi wisata dan fasilitas pendukung lainnya semakin lebih baik. Upaya yang dilakukan oleh Pemda NTB, telah menjadikan Provinsi NTB sebagai salah satu provinsi yang mampu mencapai keberhasilan dalam bidang pariwisata. Hal tersebut nampak dari tingginya angka kunjungan wisatawan.

Pembangunan pariwisata sebagai salah satu upaya Pemerintah Daerah memiliki tujuan ideal. Pada konsep ideal, Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha , peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. (pasal 258, UU 23/2014). Dengan demikian pembangunan pariwisata memiliki tujuan yang salah satunya agar daerah memiliki daya saing, termasuk dalam hal pariwisata. Daerah memiliki tanggungjawab agar kawasan dan destinasi pariwisata yang dimiliki mampu berkompetisi secara global.

Kemampuan Daerah menyusun perencanaan pembangunan

kepariwisataan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi. Pembangunan pariwisata dilaksanakan melalui program rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keberagaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan untuk berwisata ( pasal 6, UU No. 10/2009).

Keberhasilan Pemerintah Provinsi NTB dalam pembangunan kawasan pariwisata ini merupakan salah satu contoh yang dapat menjadi bahan belajar bagi daerah-daerah lain agar mampu mengembangkan potensi daerah. Keberhasilan Provinsi Nusa Tenggara Barat didukung oleh peran pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam mengelola kawasan pariwisata. Perencanaan pembangunan kepariwisataan yang baik dari yang bersifat makro strategis sampai pada perencanaan kinerja tahunan dirumuskan dengan baik dan dilaksanakan.

Kebijakan Pemerintah Daerah yang tegas dilaksanakan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pengembangan kawasan pariwisata sebagai destinasi wisata unggulan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan adanya pengembangan pariwisata yang unik maka provinsi ini mampu mencapai keberhasilan yang sangat baik dan signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara barat.

DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3817](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3817)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

---

Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak dalam pengembangan kawasan dan destinasi pariwisata daerah, perlu komitmen dan kemampuan dalam pengembangan pariwisata melalui kebijakan yang ditetapkan. Dalam hal pengembangan kawasan pariwisata di wilayah Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Provinsi NTB yang didukung oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan berbagai strategi kebijakan kepariwisataan.

Tulisan ini menjelaskan mengenai strategi pemerintah daerah dalam pengembangan kawasan pariwisata sebagai destinasi wisata unggulan di Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu penting dijelaskan dalam menjawab pertanyaan potensi pariwisata apa saja yang ada di NTB? kawasan pariwisata apa saja yang mampu menjadi *icon* destinasi wisata unggulan di Provinsi Nusa Tenggara Barat? Dan bagaimana strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mencapai keberhasilan pengembangan pariwisata?

## **METODE**

Jenis penelitian ini kualitatif, oleh karenanya menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Tujuannya mendeskripsikan objek yang diteliti melalui data yang didapat, baik data primer maupun data sekunder. Data penelitian yang diperoleh diinventaris,

kemudian di susun secara sistematis agar data dapat dengan mudah dijelaskan mengenai pengembangan kawasan pariwisata dan destinasi pariwisata di NTB.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu studi literatur dengan membaca beberapa artikel relevan pada jurnal ilmiah, maupun sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan kajian yang dilakukan. Data yang di peroleh bersumber dari data sekunder berbasis website dan sumber internet lainnya.

Secara teknis, penelitian dilakukan melalui penelusuran data berbasis website Pemerintah Daerah; Dinas Pariwisata; Badan Pusat Statistik Provinsi NTB; Sumberdata dari internet lainnya, artikel pada jurnal ilmiah yang relevan dan beberapa media online yang memuat kebijakan dan/atau pernyataan pejabat pemerintah daerah di NTB dalam kurun waktu 2017-2020.

Analisis data dilakukan setelah pengolahan data dengan cara memberikan argumentasi secara mendalam dengan membandingkan pada triangulasi data, terutama triangulasi sumber agar keabsahan dalam analisis obyektif. Hasil analisis kemudian dideskripsikan secara naratif dan membuat simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan.

DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3817](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3817)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Secara konseptual, pariwisata merupakan suatu aktivitas kepergian sementara dari seorang, menuju ke daerah lain di luar domisilinya (Suwanto, 2002). Ia melakukan kegiatan bepergian karena berbagai kepentingan yang beragam.

Undang-undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai jenis aktivitas pariwisata dan didukung oleh berbagai fasilitas serta pelayanan yang disiapkan oleh berbagai pelaku pariwisata.

Dua konsep pariwisata tersebut mengindikasikan bahwa dalam pariwisata memerlukan daya dukung dari berbagai pihak dan komponen. Dukungan yang dimaksud baik secara kelembagaan maupun individu. Secara kelembagaan maka menjadi penting adanya kolaborasi dalam bentuk kerjasama antara Pemerintah Pusat ; Pemerintah Daerah serta Kelompok Pelaku Usaha Kepariwisata. Secara individu, maka penting adanya kesadaran dari para wisatawan; pramuwisata maupun pelaku usaha pariwisata, termasuk masyarakat di kawasan pariwisata yang dikunjungi wisatawan.

Pariwisata sebagai aktivitas perjalanan baik individu maupun kelompok, maka pada setiap perjalanan memerlukan waktu untuk bersenang-senang, berdiam diri di suatu tempat dan

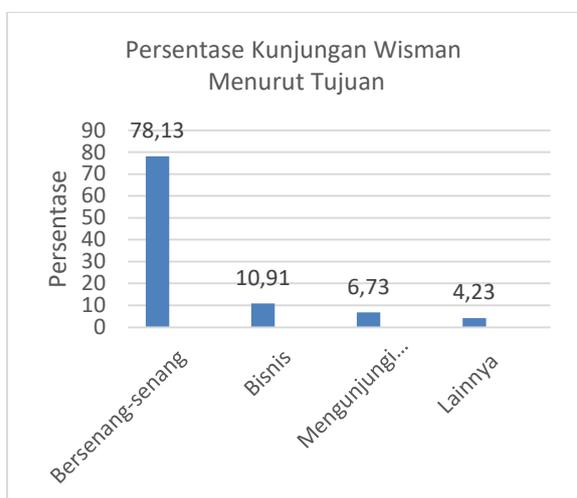
menikmati tempat dimana disinggahi. Aktivitas perjalanan yang dilakukan bertujuan mendapatkan kesenangan, kebahagiaan dan dan lainnya (Koen Meyers, 2009). Nampak bahwa wisatawan bertujuan bersenang-senang, bahkan bertujuan untuk memperoleh kepuasan dan kebahagiaan batin (Sinaga 2010).

Pariwisata sebagai aktivitas berkunjung menuju tempat yang diinginkan dan dianggap menarik untuk mendapatkan kesenangan tersendiri. Untuk memperoleh harapannya agar perjalanan yang dilakukan mendapatkan kesan yang baik dan menyenangkan, maka perlu didukung adanya fasilitas atau pelayanan yang baik yang disediakan oleh para pelaku usaha pariwisata.

Kunjungan wisatawan ke obyek destinasi pariwisata untuk mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan dan pulang membawa kenangan. Berkaitan dengan alasan bahwa wisatawan datang ke NTB untuk mendapatkan kesenangan dan beberapa alasan lainnya, maka dapat dilihat data sebagai berikut:

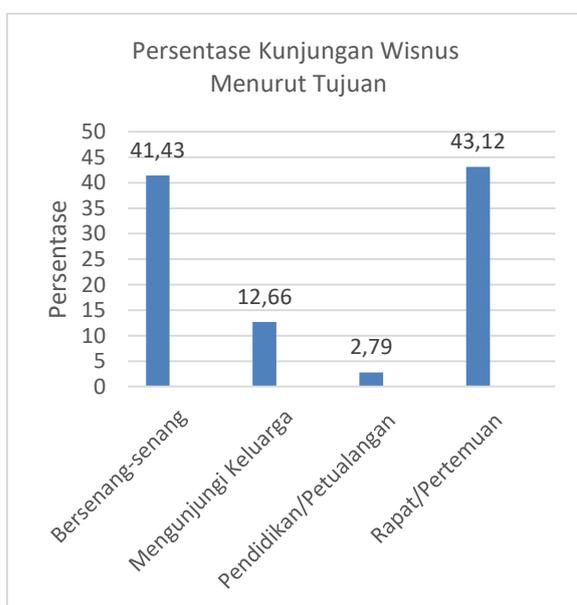
DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3817](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3817)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>



Sumber: Buku Statistik Pariwisata NTB 2017

Gambar 2. Persentase Kunjungan Wisman Menurut Tujuan



Sumber: Buku Statistik Pariwisata NTB 2017

Gambar 3. Persentase Kunjungan Wisnus Menurut Tujuan

Memperhatikan gambar 2 dan 3 mengenai diagram presentase mengenai tujuan para wisman datang berkunjung ke NTB, mayoritas untuk bersenang-senang. Mereka menyengaja datang untuk liburan dan menikmati keindahan alam dan destinasi pariwisata di NTB. Sementara pada kategori wisnus, antara tujuan bersenang-senang dan untuk kepentingan rapat/pertemuan jumlahnya imbang. Berdasarkan kondisi tersebut, maka untuk memberikan kesan yang baik bagi wisatawan, tentu saja hal ini memerlukan profesionalisme dari para pengelola obyek pariwisata.

Pemerintah Daerah, sebagai ujung tombak dalam pengembangan kawasan pariwisata dan destinasi pariwisata dituntut untuk melaksanakan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan sinergi dengan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah kabupaten/kota.

Salah satu tugas dari Pemerintah Daerah adalah menyusun rencana program pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional ( Pasal 260, UU Nomor 23/2014). Dengan demikian, strategi kebijakan pembangunan pariwisata daerah harus sesuai dan bersinergi dengan pembangunan kepariwisataan nasional sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Makna pembangunan sebagai proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan

DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3817](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3817)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

Dedy, 2005). Dalam aktivitas perubahan tersebut terlebih dahulu dilakukan perencanaan pembangunan terkait dengan ekonomi. Karena Pembangunan pariwisata berkaitan dengan destinasi pariwisata, aktivitas wisatawan, pelaku usaha wisata dan lain-lain. Dengan demikian adanya kebijakan pembangunan ekonomi daerah menjadi penting. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja penggunaan sumber-sumber daya publik yang tersedia di daerah (Ananda, 2018).

Pembangunan pariwisata sebagai bagian dari pembangunan ekonomi daerah, berkaitan dengan keterlibatan berbagai pihak dalam upaya meningkatkan daya saing daerah. Pembangunan pariwisata dengan fokus pada pembangunan kawasan dan destinasi pariwisata, Provinsi NTB melaksanakan pembangunan pariwisata melalui berbagai strategi kebijakan. Salah strategi yang ditempuh adalah strategu perumusan perencanaan pembangunan pariwisata secara bertahap dan sinergi.

### **Potensi Pariwisata NTB**

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan ibu kota Mataram terdiri atas dua wilayah pulau besar, pulau Lombok dan pulau Sumbawa. Dikelilingi oleh 280 pulau-pulau kecil. Provinsi NTB memiliki luas 49.312,19 Km<sup>2</sup>. Luas daratan 20.153,15 Km<sup>2</sup> (40,87%) dan perairan

29.159,04 Km<sup>2</sup> (59,13%), (BPS Provinsi NTB, 2017).

Secara administratif, NTB terbagi menjadi 10 Kabupaten/Kota, sebanyak 116 wilayah kecamatan, 142 kelurahan, dan sisanya 995 desa. Ia berbatasan dengan Laut Jawa dan Laut Flores sebelah Utara. Di wilayah Selatan berbatasan Samudra Indonesia. Wilayah Barat berbatasan dengan Selat Lombok/Provinsi Bali, dan Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Sape/Provinsi Nusa Tenggara Timur. (BPS Provinsi NTB, 2019).

Kekayaan alam NTB melimpah dan menyimpan keanekaragaman sumber daya alam yang meliputi sumber daya perhutanan, lahan persawahan serta wilayah perkebunan, pertambangan, peternakan, kelautan dan pariwisata. Dimilikinya sumber kekayaan alam, NTB idealnya mampu menjadi suatu wilayah yang lebih baik dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya.

Letak wilayah NTB sangat strategis pada konteks geografi kepariwisataan,. Berada pada wilayah Segi Tiga Emas Daerah tujuan Wisata (DTW) utama Indonesia yaitu Pulau Bali di sebelah barat yang merupakan Daerah Tujuan Wisata (DTW) internasional, yaitu Taman Nasional Pulau Komodo dan di sebelah Utara terdapat Tanah Toraja ( Buku Statistik Pariwisata NTB, 2017).

DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3817](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3817)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

Upaya rintisan pengembangan potensi pariwisata di NTB dilaksanakan sejak tahun 1980-an. Destinasi pariwisata yang cukup terkenal di Pulau Lombok yaitu potensi wisata Pantai Senggigi dan Gili Trawangannya, yang kemudian dikembangkan juga di Pulau Sumbawa, potensi wisata Pulau Moyo yang sudah mulai dikenal tahun 1900-an. (Buku Statistik Pariwisata NTB, 2017).

Pengembangan kawasan pariwisata di Nusa Tenggara Barat bertujuan salah satunya optimalisasi pemanfaatan dan pemberdayaan berbagai potensi yang dimiliki oleh daerah dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025. Potensi pariwisata yang dimiliki menjadi modal dasar bagi pengembangan pariwisata NTB sehingga peningkatan wisatawan terus meningkat setiap tahunnya.

Jumlah rata-rata wisatawan yang berkunjung ke NTB selama tahun 2013-2017, sebanyak 25,16%. (Renstra Kepariwisata NTB, Dinas Pariwisata NTB, 2019). Angka yang cukup tinggi, sehingga memerlukan keseriusan dari dari berbagai pihak, baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah termasuk juga Pelaku Usaha Pariwisata pembangunan pariwisata di NTB. Berikut perkembangan jumlah wisatawan baik wisatawan yang berwisata ke NTB dalam pada tahun 2013-2018.

Tabel: 2 Jumlah Wisatawan Ke NTB Tahun 2013-2018

Tahun	Wisman	Wisnus	Jumlah	+/- (%)
2014	752.306	876.816	1.629.122	8.6
2015	1.061.292	1.149.235	2.210.527	34.0
2016	1.404.328	1.690.109	3.094.437	76.8
2017	1.430.249	2.078.654	3.508.903	0.25
2018	1.204.556	1.607.823	2.812.379	29.7

Sumber: Dokumen Renja Dinas Pariwisata NTB, 2019.

Peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke NTB seperti tabel 2 di atas mengindikasikan bahwa NTB menjadi salah satu daerah yang diminati banyak orang untuk berwisata. Banyaknya pilihan destinasi pariwisata NTB merupakan daya tarik bagi para wisatawan.

Potensi pariwisata Provinsi NTB yang cukup banyak menjadi agenda dan program pemerintah daerah untuk memprioritaskan pembangunannya. Strategi Pemerintah Daerah dalam pembangunan kawasan pariwisata dan destinasi pariwisata dilakukan secara bertahap berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan sumberdaya pendukung lainnya.

### **Kawasan Pariwisata dan Destinasi Pariwisata Unggulan**

Pembangunan pariwisata, fokus pada daerah tujuan pariwisata. Karena wisatawan lebih melihat pada tujuan yang di kunjung. Daerah tujuan pariwisata atau merupakan suatu daerah yang

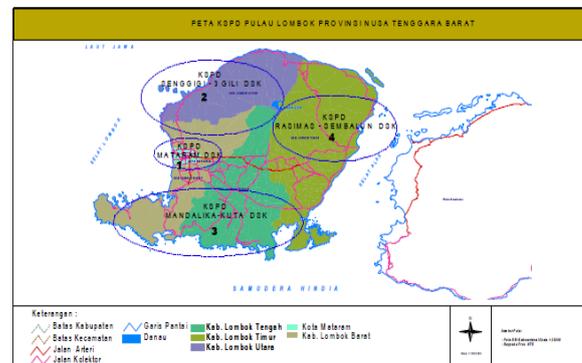
DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3817](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3817)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

didalamnya memiliki daya tarik pariwisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya pariwisata ( Pasal 1, ayat 6, UU No. 10 Tahun 2009).

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadikan pembangunan kepariwisataan sebagai salah satu prioritas utama setelah pertanian. Ini merupakan respon atas kebijakan pemerintah setelah ditetapkannya Nusa Tenggara Barat sebagai “*Pintu Gerbang Pariwisata Nasional*”. (Renstra Kepariwisata NTB 2019-2023, Dinas Pariwisata Provinsi NTB, 2020).

Upaya serius dengan komitmen yang tinggi, Pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan suatu kawasan yang memiliki potensi baik dan dapat dikembangkan sebagai kawasan pariwisata serta mampu melaksanakan peningkatan yang signifikan untuk kemajuan pariwisata. Berikut gambar pembagian Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Provinsi NTB di Pulau Lombok yang dibagi ke dalam empat KSPD.



Sumber: Lampiran III Perda No. 7 Tahun 2013 tentang RIPDAPAR NTB 2013-2028.

Gambar 4. KSPD Pulau Lombok NTB

Pada gambar berikut merupakan pembagian KSPD di Pulau Sumbawa dan sekitarnya yang terbagi ke dalam 7 KSPD.



Sumber: Lampiran III Perda No. 7 Tahun 2013 tentang RIPPARDA NTB 2013-2028.

Gambar 5. KSPD Pulau Sumbawa NTB

Berdasarkan gambar 4 dan 5 menunjukkan bahwa KSPD dibagi ke dalam dua wilayah besar, Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Dari masing-masing pulau tersebut dibagi ke dalam beberapa KSPD. Pembagian tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan, pelaksanaan

DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3817](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3817)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

dan evaluasi dari program pembangunan kepariwisataan di NTB. Sektor pariwisata NTB pada masing-masing KSPD memiliki peluang pengembangan. Banyak obyek wisata dan beragam potensi wisata yang menjadi daya tarik bagi para pengunjung. Terkait dengan hal tersebut, destinasi/obyek kunjungan wisata yang sebagai suatu daerah yang dikunjungi wisatawan untuk kurun waktu tertentu ( Ricardson dan fluker, 2004). Dengan demikian Pembangunan kawasan pariwisata dan destinasi pariwisata yang tersebut perlu dikembangkan agar terjamin keberlanjutannya. Pembangunan kepariwisataan memiliki peranan penting bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2020)

*Icon* pariwisata yang menjadi daya tarik di Provinsi NTB yaitu terletak di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Pulau Lombok terdapat potensi wisata Pantai Senggigi dan Gili Trawangan, sedangkan di Pulau Sumbawa terdapat potensi wisata Pulau Moyo. Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada sektor pariwisata sangat mendukung untuk menghasilkan devisa negara. Terdapat kawasan-kawasan pariwisata sebagai destinasi wisata unggulan yang sangat diminati oleh wisatawan.

Semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung ke berbagai destinasi pariwisata di Provinsi NTB, pada sisi lain menjadi pekerjaan rumah tangga yang cukup besar bagi Pemerintah Daerah dan unsur terkait lainnya dalam

pengembangan destinasi pariwisata (Paryono, 2018). Dari kawasan pariwisata dan destinasi yang sudah dimiliki memerlukan pengembangan yang lebih baik. Dukungan fasilitas umum pendukung, hotel, restoran dan atraksi seni budaya merupakan hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi NTB.

### **Permasalahan dalam Pembangunan Kawasan Pariwisata dan Destinasi Unggulan**

Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi NTB tidak hanya ditentukan oleh beragamnya destinasi pariwisata, melainkan juga berbagai faktor lainnya seperti prasarana dan sarana pendukung, keberadaan hotel dan restoran serta atraksi seni budaya dan lain-lain (Hidayat,2017). Oleh karena itu dalam pembangunan kawasan pariwisata dan destinasi pariwisata di NTB tidak lepas dari adanya permasalahan. Beberapa permasalahan pokok pada bidang pariwisata di Provinsi NTB:

- a. Masih terbatasnya Akses dan infrastruktur yang menunjang di destinasi pariwisata.
- b. Jumlah rata-rata Lama Menginap (RLM) wisatawan masih rendah baik di Hotel berbintang maupun hotel melati/penginapan.
- c. Belum dimilikinya sertifikasi pada destinasi dan pendukung pada sektor

DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3817](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3817)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

wisata halal (sertifikasi halal produk, layanan dll) (RPJMD Provinsi NTB 2019-2023).

Beberapa permasalahan tersebut, termasuk konsep pariwisata halal, sebagai salah satu agenda pemerintah daerah (Awalia, 2017) ; (Hidayat, 2018) menjadi bagian agenda Dinas Pariwisata Provinsi NTB untuk menyusun perencanaan program pembangunan kepariwisataan agar semakin baik.

Permasalahan kepariwisataan yang diidentifikasi oleh Dinas Pariwisata Provinsi NTB sebagai dasar untuk menyusun Rencana Strategis Dinas Pariwisata, telah dirumuskan dalam isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengelolaan destinasi pariwisata;
2. Program kegiatan Pemasaran pariwisata masih parsial dan belum terkoordinasi dengan baik;
3. Terbatasnya jumlah sumberdaya pariwisata yang berkualitas dan sehingga belum memadai untuk menjawab tantangan pembangunan kepariwisataan;
4. Pola kemitraan dan kerjasama bidang kepariwisataan belum dilaksanakan secara efektif;
5. Pengembangan atraksi dan daya tarik wisata belum optimal;
6. Perlunya meningkatkan investasi daerah terutama terutama investor swasta dalam mendukung pembangunan sektor wisata. (Renstra

Dinas Pariwisata NTB Tahun 2019-2023).

Selanjutnya dari isu strategis yang dirumuskan tersebut kemudian menjadi dasar dalam penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan pariwisata dalam Renstra Dinas Pariwisata. Pada perencanaan tahunan atau Rencana Kerja Dinas Pariwisata, dalam dokumen perencanaan pembangunan pariwisata yang disusun oleh Dinas Pariwisata Provinsi NTB pada tahun 2020, Rencana kerja yang dibuat memperhatikan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Belum terpenuhinya kelembagaan kepariwisataan yang mandiri serta sarana dan prasarana pendukung.
2. Upaya mewujudkan destinasi wisata yang aman, nyaman belum terpenuhi secara optimal, sehingga kenyamanan dan keamanan berada di kawasan wisata belum terjamin.
3. Pemasaran dalam pariwisata belum menggunakan system yang berbasis IT dan belum mampu menjangkau pasar yang jauh lebih luas.
4. Perlu difasilitasi dalam penyelenggaraan atraksi sebagai daya tarik budaya pada lokasi-lokasi destinasi wisata dalam menarik tingkat kunjungan dan pengoptimalisasian pemasaran industri kreatif sebagai usaha dalam memajukan produk usaha lokal.

DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3817](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3817)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

5. Penambahan Investasi pada sektor pariwisata perlu peningkatan baik jumlah maupun kualitasnya secara signifikan.
6. Kemitraan dengan berbagai pihak terkait dalam pengembangan kepariwisataan belum optimal dilaksanakan. (Renja Diparda Prov NTB, 2020).

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi NTB tersebut merupakan hasil identifikasi dan inventarisasi dari berbagai komponen kepariwisataan. Pemerintah Daerah, Investor, Pelaku usaha dan masyarakat berkontribusi atas identifikasi permasalahan kepariwisataan di NTB. Dengan terdatanya berbagai permasalahan kepariwisataan di Provinsi NTB maka akan memudahkan Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi ; arah kebijakan dan program pembangunan pariwisata di NTB.

### **Strategi Pembangunan Kawasan Pariwisata dan Destinasi Priwisata**

Secara konsep, dalam kajian manajemen, termasuk dalam manajemen pemerintahan, strategi dalam penyelenggaraan pembangunan sangat diperlukan. Strategi sebagai konsep merupakan tindakan potensial yang memerlukan keputusan pihak manajemen di tingkat atas dan memerlukan sumber daya dalam yang besar (David, 2012). Pada konteks pemerintahan daerah, maka

Pemerintah Daerah bersama DPRD memiliki kewenangan strategis untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Termasuk juga dalam pengelolaan kepariwisataan daerah.

Peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kawasan pariwisata dan destinasi pariwisata yang ideal sangat diperlukan. Kedudukannya sebagai penentu kebijakan di tingkat Provinsi, Pemerintah Daerah Provinsi NTB bersama dengan DPRD merumuskan dan menetapkan kebijakan pembangunan daerah, baik jangka panjang (RPJPD) maupun jangka menengah (RPJMD).

Sektor pariwisata, merupakan salah satu urusan pemerintahan pilihan bagi daerah ( Pasal 12, UU No. 23/2014), di Provinsi NTB pariwisata dijadikan prioritas kedua dalam pembangunan setelah sektor pertanian. Komitmen pemerintah Daerah Provinsi NTB dibuktikan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Provinsi NTB tentang RIP Kepariwisata Daerah Tahun 2013-2028.

Ditetapkannya Perda tentang pembangunan kepariwisataan tersebut merupakan strategi pemerintah daerah secara makro. Pariwisata diharapkan berdampak positif bagi perkembangan perekonomian daerah. Secara konsep Pariwisata mampu berkontribusi pada pembentukan ekonomi yang kuat bagi suatu wilayah (Darwanto, 2002). Dalam Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata NTB, didalamnya diuraikan perencanaan pembangunan kepariwisataan untuk kurun waktu jangka panjang, selama 15 tahun. Untuk memudahkan dalam menterjemahkan

DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3817](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3817)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

kebijakan strategis tersebut kemudian dibagi ke dalam tiga tahapan pembangunan. Tahap I Program Pembangunan Kepariwisata tahun 2014-2018; Tahap II Program Pembangunan Kepariwisata tahun 2019-2023; dan Tahap III Program Pembangunan Kepariwisata Tahun 2024-2028.

Berikut dapat dilihat perencanaan induk pembangunan kepariwisataan daerah NTB tahap I untuk kurun waktu 2014-2018.

**Tabel 3. Tahap I Program Pembangunan Kepariwisata 2014-2018**

No.	Uraian Tahapan I (2014-2018)
a.	Pengembangan daya tarik wisata berdasarkan keberagaman melalui berbagai tema yang menarik melalui kreativitas dan inovatif;
b.	Penguatan melalui berbagai upaya konservasi sumber daya wisata dan lingkungan;
c.	Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan partisipasi masyarakat untuk pemahaman, dukungan masyarakat sadar wisata dalam menciptakan sapta pesona sehingga tercapai iklim kepariwisataan yang kondusif;
d.	Mengembangkan berbagai model promosi dan pemasaran Kepariwisata untuk menambah dan memperluas jaringan pasar, secara global;
e.	Mengembangkan berbagai fasilitasi, kebijakan, insentif dan disinsentif dalam pengembangan usaha sektor pariwisata; dan
f.	Optimalisasi kemitraan usaha Pariwisata antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten /Kota, swasta dan masyarakat.

Sumber: Lampiran IV Perda No. 7 Tahun 2013 Provinsi NTB setelah diolah.

Prioritas pembangunan pariwisata pada tahap I lebih memfokuskan pada pengembangan keragaman daya tarik wisata, konservasi sumberdaya wisata; dukungan partisipasi masyarakat regulasi pengembangan usaha sektor pariwisata dan mengoptimalkan kemitraan usaha sector pariwisata. Strategi pembangunan pada tahap ini lebih pada konsolidasi pembangunan. Memantapkan pondasi supaya kuat untuk kemudian dilanjutkan pada tahapan II.

Berikut ini diuraikan data perencanaan induk pembangunan kepariwisataan Provinsi NTB tahap ke II.

**Tabel 4. Tahap II Program Pembangunan Kepariwisata 2019-2023**

No.	Uraian Tahapan II (2019-2023)
a.	Pengembangan inovasi dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan kawasan Pariwisata Daerah;
b.	Peningkatan mutu dan jumlah sarana dan prasarana transportasi yang aman, nyaman, lancar dan berbudaya bagi para penggunanya ;
c.	Pengembangan paket Wisata terpadu antar obyek dan antar wilayah yang didukung oleh peningkatan dukungan sektor lainnya untuk pengembangan Pariwisata;
d.	Keterlibatan masyarakat dalam Kepariwisata terus ditingkatkan agar mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat;
e.	Pengembangan citra Kepariwisata di NTB sebagai Daerah Tujuan Pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing;
f.	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan para pelaku usaha pariwisata dan produk layanan usaha perekonomian masyarakat pelaku wisata ; dan
g.	

DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3817](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3817)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

Dilakukannya berbagai upaya standarisasi dan program sertifikasi Sumber Daya Manusia dan Industri di bidang Pariwisata.

Sumber: Lampiran IV Perda No. 7 Tahun 2013 Provinsi NTB, setelah diolah.

Pada pembangunan kepariwisataan tahap II lebih fokus pada inovasi dan pemanfaatan teknologi IT dalam kepariwisataan NTB. Hal tersebut nampak adanya inovasi pada daya tarik wisata; moda untuk wisatawan; konsep paket wisata terpadu, partisipasi masyarakat dalam pariwisata untuk kesejahteraan; membangun citra kepariwisataan; peningkatan keterampilan tenaga kepariwisataan dan standarisasi SDM kepariwisataan. Jika diperhatikan lebih dalam, pada tahap II lebih mengutamakan pada aspek SDM baik dari masyarakat maupun tenaga kepariwisataan dalam membangun citra pariwisata yang unggulan di NTB.

Selanjutnya dapat dilihat program pembangunan kepariwisataan NTB tahap III untuk tahun 2024-2028.

Tabel 5. Tahap III Program Pembangunan Kepariwisataan 2024-2028

No.	Uraian Tahapan III (2024-2028)
-----	-----------------------------------

- a. Tercapainya tujuan sebagai wisata yang inovatif, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, dan berwawasan lingkungan dan mampu berkontribusi untuk meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Tercapainya pemasaran Pariwisata yang bersinergi, unggul, dan bertanggung jawab sehingga wisatawan meningkat dari tahun ke tahun;
- c. Terciptanya industri Pariwisata yang memiliki daya saing, kredibel, mampu menggerakkan pola kemitraan usaha, dan bertanggung jawab untuk kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan sosial budaya masyarakat;
- d. Terwujudnya sinergitas organisasi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, dan masyarakat, dan berkembangnya Sumber Daya Manusia, kebijakan, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien untuk mendorong mencapai kepariwisataan yang berkelanjutan;
- e. Terciptanya masyarakat sadar wisata untuk mendukung Sapta Pesona; dan
- f. Terciptanya Daerah sebagai destinasi pariwisata berbasis budaya terkemuka di Asia Tenggara yang memiliki kekhasan dan kekhususan dengan keanekaragaman Daya Tarik Wisata dan budaya.

Sumber: Lampiran IV Perda No. 7 Tahun 2013 Provinsi NTB, setelah diolah.

Pada strategi pembangunan jangka panjang tahap III, Provinsi NTB merumuskan Program pembangunan kepariwisataan tahun 2024-2028 dengan keyakinan terwujudnya pembangunan pariwisata yang handal baik daya tarik sehingga akan mencapai pada keberhasilan pembangunan pariwisata Provinsi NTB. Dirumuskannya strategis tersebut dapat mempengaruhi

DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3817](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3817)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

peningkatan jumlah wisatawan secara positif (Sabon, dkk, 2018)

Sebagai capaian akhir pada tahap III program pembangunan jangka panjang kepariwisataan, Provinsi NTB menetapkan target capaian menjadikan NTB tujuan Pariwisata berbasis budaya terkemuka di wilayah Asia Tenggara. Sebagai ciri utamanya mempunyai ciri khas dan kekhususan pada keanekaragaman Daya Tarik Wisata dan budaya.

Sebagai penjabaran dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisatan NTB 2013-2018, Pemerintah Provinsi NTB telah menetapkan kebijakan strategi Pengembangan Kawasan Strategi Pariwisata Daerah (KSPD). Ditetapkannya wilayah pengembangan pariwisata daerah ini untuk memudahkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pariwisata di NTB. Keseluruhan KSPD tersebut berjumlah 11 (sebelas) wilayah pengembangan. Secara lebih detail dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 6. Strategi Pengembangan KSPD NTB

No	Wilayah KSPD	Fokus Pengembangan
1	KSPD Mataram dan sekitarnya	Fokus Pengembangan pada kawasan wisata seni budaya, keagamaan, pusat kuliner, wisata belanja dan MICE
2	KSPD Senggigi - Tiga Gili dan sekitarnya	Fokusnya pada pengembangan kawasan wisata tradisional; kawasan pantai, bawah laut, olah raga berbasis bahari, seni budaya,

		keagamaan dan pusat kuliner;
3	KSPD Kuta Mandalika dan sekitarnya	Fokus pengembangan pada kawasan pariwisata pantai, daerah bawah laut, olah raga berbasis bahari, dan seni budaya
4	KSPD Rasimas-Semalun dan sekitarnya	Fokus pengembangan pada kawasan wisata berbasis pertanian dan pegunungan yaitu wisata agro, pegunungan dan kuliner
5	KSPD Alasutan dan sekitarnya	Fokus pengembangan pada kawasan pariwisata pantai, agrowisata, wisata seni budaya, dan wisata kuliner
6	KSPD Pototano-Maluk dan sekitarnya	Fokus pengembangan pada kawasan pariwisata pantai, wisata olah raga berbasis bahari, wisata tratksi seni budaya, dan wisata kuliner
7	KSPD Batu Hijau-Dodorinti dan sekitarnya	Fokus pengembangan pada kawasan wisata pegunungan, tambang, budaya, dan kuliner
8	pengembangan KSPD SAMOTA (Teluk Saleh-Moyo-Tambora) dan sekitarnya	Fokus pengembangan pada kawasan pariwisata pantai, pariwisata bawah laut, olah raga berbasis bahari, atraksi seni budaya, wisata kuliner dan wisata pegunungan
9	KSPD Hu'u dan sekitarnya	Fokus pengembangan kawasan wisata pantai, wisata bawah laut, wisata olah raga

DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3817](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3817)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

			berbasis bahari, dan wisata kuliner
10	KSPD Bima dan sekitarnya	Teluk dan	Fokus pada pengembangan kawasan wisata pantai, wisata olah raga berbasis bahari, wisata atraksi seni budaya, dan wisata kuliner
11	KSPD Waworada-Sape dan sekitarnya		Fokus pada pengembangan kawasan pariwisata pantai, pariwisata bawah laut, pariwisata olah raga berbasis bahari, dan wisata kuliner

Sumber: Perda Provinsi NTB No. 7 Tahun 2013, setelah diolah.

Ditetapkannya 11 wilayah KSPD oleh Pemerintah Provinsi NTB dalam bentuk Peraturan Daerah, memberikan kekuatan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan strategis sampai pada program teknis kepariwisataan. Dengan adanya Perda kepariwisataan yang mengkhhususkan pada RIPPARDA Provinsi NTB, mengindikasikan kejelasan kebijakan pembangunan pariwisata NTB.

Selanjutnya RIPARDA Provinsi NTB tersebut, dalam implementasinya dibagi menjadi tiga tahapan. Masing-masing tahapan tersebut dibagi ke dalam lima tahunan. Untuk setiap tahapannya dideskripsikan indikasi dan tahapan program pembangunan. Strategi dalam implepemntasi pembangunan pariwisata NTB diterjemahkan ke dalam Perencanaan Jangka Menengah. Kebijakan RPJMD tersebut merupakan kebijakan

perencanaan pembangunan di daerah dalam kurun waktu lima tahunan.

Terkait dengan perencanaan pembangunan bidang pariwisata, dalam RPJMD Provinsi NTB untuk tahun 2019-2023, dapat dilihat strategi dan arah kebijakan pembangunan pariwisata sebagai berikut:

Tabel 7. Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Pariwisata Provinsi NTB

No	Strategi	Arah Kebijakan
1	Pengembangan dan pemasaran pariwisata	Peningkatan pengelolaan dan pengembangan obyek wisata daya dan promosi/pemasaran pariwisata
2	Revitalisasi desa-desa kategori miskin namun memiliki potensi pariwisata dikembangkan menjadi desa wisata.	mendorong desa-desa miskin yang memiliki potensi sumberdaya untuk menjadi desa wisata
3	Pengembangan desa wisata	a. mendorong pemangku kepentingan untuk membentuk desa wisata sesuai dengan potensi daerah; b. mengembangkan destinasi wisata/obyek wisata untuk mencapai standar wisata halal.

Sumber: RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023.

Memperhatikan pada strategi kebijakan arah dan sasaran kebijakan pada pengembangan pariwisata NTB yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) pada tahun 2019-2023, nampak pada strategi yang ditempuh adalah fokus pada pengembangan daya tarik pariwisata (destinasi pariwisata dan atraksi pariwisata); revitalisasi desa miskin menjadi desa wisata dan pengembangan desa wisata yang sudah ada sehingga lebih optimal dan menghasilkan sumber pendapatan bagi masyarakat.

Pada strategi pertama, arah kebijakan pemerintah daerah adalah pada upaya meningkatkan kualitas pengelolaan obyek pariwisata disertai dengan berbagai atraksi pariwisata yang berbasis pada budaya lokal dengan inovasi yang mendukung. Kondisi ini seperti pada hasil studi di daerah lain bahwa sering adanya perbedaan yang tinggi dalam jumlah kunjungan wisata antar daerah, hal ini disebabkan kualitas destinasi wisata antar Kabupaten belum merata (Hermawan, 2017). Sedangkan pada strategi kedua, pemerintah daerah berupaya mendorong desa yang miskin namun memiliki potensi pariwisata lokal dikembangkan sebagai desa wisata yang memiliki nilai jual tinggi dan dikunjungi wisatawan. Fokus pada arah kebijakan ini, maka lebih berbasis pada masyarakat desa setempat sehingga manfaat bagi masyarakat langsung dirasakan. Dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung ke

desa wisata maka sejalan itu masyarakat mendapatkan pendapatan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan. Pada strateki dan arah kebijakan ketiga, lebih pada pengembangan desa wisata yang sudah ada menjadi semakin luas dan baik. Beberapa desa adat dan desa wisata yang sudah ada dikelola lebih baik sehingga semakin berkembang. Selain pada pengembangan desa wisata, pada arah kebijakan ketiga selama kurun waktu 2019-2023 mengembangkan daerah wisata dengan standar wisata halal. Icon tersebut menjadi bagian penting menjadi daya tarik bagi wisatawan.

Berlandaskan pada RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023, Dinas Pariwisata menegaskan strategi pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata melalui kebijakan strategis yang menjadi wewenang Dinas Pariwisata. Dalam dokumen Renstra Dinas Pariwisata dirumuskan tujuan pembangunan pariwisata NTB yaitu: Mengembangkan potensi pariwisata Nusa Tenggara Barat yang berbasis "*community based tourism*" dan "*friendly moslem tourism*". Berikut diuraikan sasaran; strategi dan arah kebijakan pembangunan pariwisata dalam jangka menengah oleh Dinas Pariwisata sebagai berikut:

Tabel 8. Sasaran ; Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Pariwisata NTB 2019-2023.

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Terwujudnya	Penguatan pada promosi	Meningkatkan pengelolaan

DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3817](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3817)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

	pengembangan dan pemasaran Pariwisata	baik secara langsung (direct promotion) , sales mission , branding, maupun melalui media, baik lokal maupun internasional serta dukukung data statistik Pariwisata yang terukur;	dan pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata siap jual melalui promosi dan pemasaran Pariwisata;
2	Meningkatnya penataan sarana dan prasarana objek wisata	Fasilitasi, penguatan sarpras, serta koordinasi yang diarahkan pada pengembangan potensi destinasi wisata khususnya desa wisata dan amenitas yang berstandar halal	Mendorong pembentukan desa wisata sesuai potensi wilayah serta mengembangkan daerah wisata dengan memenuhi standar wisata halal;
3	Peningkatan SDM kepariwisataan;	Penguatan peranan pokdarwis pada desa wisata dalam bentuk penyuluhan serta sertifikasi kualifikasi SDM Kepariwisataan	Menciptakan lapangan kerja mandiri bagi masyarakat sekitar destinasi wisata;
4	Peningkatan kuantitas dan kualitas atraksi daya tarik Pariwisata.	Mengembangkan dan memfasilitasi keragaman atraksi sebagai daya Tarik wisata dan industri kreatif	Meningkatkan kualitas atraksi Pariwisata serta industri kreatif.

Sumber: Dokumen Renstra Diparda NTB 2019-2023

Dalam Renstra Dinas Pariwisata nampak bahwa terdapat empat sasaran utama dalam pembangunan pariwisata NTB. Untuk mencapai setiap sasaran tersebut maka dilakukan strategi dan arah kebijakan untuk mencapainya. Adanya dokumen renstra ini sangat penting bagi terjaminnya terselenggara program pembangunan pariwisata pada setiap tahunnya. Dari renstra tersebut maka disusun Rencana Kerja tahunan dari Dinas Pariwisata.

Dalam perencanaan yang lebih operasional, Dinas Pariwisata mencoba mengidentifikasi berbagai permasalahan kepariwisataan untuk kemudian disusun program tahunan. Program tahunan tersebut sebagai rencana kerja/ rencana kinerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata setiap tahun. Dalam rencana kinerja ini dirumuskan sasaran strategis; indikator kinerja dan target capaian yang diharapkan tercapai.

Rencana kinerja selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan program kerja Dinas Pariwisata disertai dengan kebutuhan anggaran. Program yang disusun kemudian akan diusulkan dalam RAPB Pemerintah Daerah Provinsi NTB untuk kemudian ditetapkan menjadi APBD. Berikut rencana kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 :

DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3817](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3817)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

Tabel 9. Rencana Kinerja Tahun 2020  
Dinas Pariwisata Provinsi NTB

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya pengembangan dan pemasaran pariwisata	Jumlah Kunjungan wisatawan	4.400.000 orang
2	Meningkatnya penataan sarana dan prasarana objek wisata	Jumlah Desa Wisata	20 Desa wisata
3	Peningkatan SDM kepariwisataan	SDM Kepariwisataan Yang tersertifikasi	200 orang
4	Peningkatan kuantitas dan kualitas atraksi dan daya tarik pariwisata	Rata-rata lama menginap wisatawan	2,95 hari
5	Meningkatnya penataan geosite	Jumlah geosite yang tertata (Rinjani/Tambora)	2 paket

Sumber: Dokumen Dinas Pariwisata NTB, 2020.

Rincian rencana kinerja Dinas Pariwisata yang disusun menjadi pedoman bagi setiap bidang yang ada di lingkungan Dinas Pariwisata. Program kegiatan disusun sesuai dengan rencana kinerja yang disusun. Keberlanjutan program sangat ditentukan oleh sinergitas antara progrid pada level am yang dibuat, baik dalam Dinas Pariwisata sendiri maupun dengan lintas SKPD terkait di Pemerintah Provinsi NTB.

Strategi Pemerintah Provinsi NTB dalam pembanguna pariwisata melalui dirumuskannya sasaran, strategi, arah kebijakan pada tingkat perencanaan jangka panjang (RIPPARDA) dan Renstra

Dinas Pariwisata menjadi indikator adanya komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata yang lebih baik dan berkelanjutan. Dalam strategi yang lebih teknis dan operasional, Dinas Pariwisata telah menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pariwisata dengan adanya kejelasan sasaran strategis, indikator kinerja dan target capaian dari program kegiatan yang direncanakan.

## SIMPULAN

Pembangunan pariwisata di Nusa Tenggara Barat dilaksanakan secara baik dan terprogram. Peningkatan jumlah kunjungan orang berwisata dari tahun ke tahun meningkat. Nusa Tenggara Barat mampu mengembangkan kawasan strategi pariwisata daerah (KSPD) dan destinasi pariwisata unggulan berdasarkan potensi kepariwisataan yang dimiliki. Pemerintah Daerah Provinsi mampu mencapai keberhasilan pembangunan pariwisata tersebut melalui beberapa strategi: *Pertama*, strategi pemerintah daerah dalam melakukan identifikasi potensi pariwisata; penetapan destinasi pariwisata unggulan; penetapan kawasan strategi pariwisata dan perumusan RIPPARDA; Rencana Strategi Kepariwisataan Dinas Pariwisata dan Rencana Kinerja Dinas Pariwisata. *Kedua*, sistem perencanaan pembangunan kepariwisataan di Provinsi Nusa Tenggara

DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3817](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3817)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

Barat dirumuskan secara berjenjang mulai dari RPJPD; RPJMD; RIPPANDA; Renstra Dinas Pariwisata dan Rencana Kinerja Dinas Pariwisata, sinergi dan melibatkan multi stakeholders dari unsur Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha Pariwisata, Swasta/Investor dan Masyarakat Pariwisata. *Ketiga*, pembangunan pariwisata dilaksanakan secara berkelanjutan melalui merubah desa yang miskin namun memiliki potensi pariwisata menjadi desa wisata. *Keempat*, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara didukung pada tingkat Kabupaten/Kota melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana pendukung pariwisata baik melalui dana APBN, APBD maupun Investor; melakukan pemasaran melalui promosi pariwisata; menjalin kemitraan dengan pelaku usaha pariwisata, investor dan masyarakat pariwisata; peningkatan kualitas sumberdaya manusia kepariwisataan melalui pelatihan dan pembinaan secara berjenjang, terpadu dan berkelanjutan; peningkatan jumlah dan kualitas atraksi pariwisata.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al Fathanah, A., Wahyudi, B., & Purba, P. A. (2018). Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Bogor. *Ekonomi Pertahanan*, 4(3).
- Ananda, C. F. (2018). *Pembangunan ekonomi daerah: dinamika dan strategi pembangunan*. Universitas Brawijaya Press.
- Awalia, H. (2017). Komodifikasi Pariwisata Halal NTB dalam Promosi Destinasi Wisata Islami di Indonesia. *Jurnal Studi Komunikasi*, 1(1), 19-30.  
DOI: <http://10.25139/jsk.v1i1.64>  
(23/09/2020/21.20)
- David, Fred R. 2012. *Konsep Manajemen Strategi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hermawan, H. (2017). Pengembangan Destinasi Wisata pada Tingkat Tapak Lahan dengan Pendekatan Analisis SWOT. *Jurnal Pariwisata*, Vol. IV No. 2 September 2017.  
DOI: 10.31311/par.v4i2.1942.
- Hidayat, S. (2017). Peranan Hotel Lombok Raya terhadap Masyarakat Sekitar dan Daya dukungnya terhadap Kebutuhan Sektor Pariwisata di Pulau Lombok. *VALID Jurnal Ilmiah*, 14(2), 177-184.
- Hidayat, R., Awaluddin, M., & Candra, C. (2018). Implementasi Kebijakan Pariwisata Halal Di NTB (Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal). *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 6(2), 85-92.  
DOI: 10.31764/jiap.v6i2.645.
- Meyers, Koen. (2009). *Pengertian Pariwisata*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3817](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3817)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

- 
- Mulyana, B. (2012). Pengembangan Kota Bogor Sebagai Destinasi Pariwisata Internasional. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 2(1), 109-222.
- Paryono, P., Untari, D. T., & Syahiddin, M. (2018). Pengembangan Destinasi Wisata Pulau Tidung; Communities Base Tourism. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 5(1), 62-69. DOI: 10.30998/jabe.v5i1.3163.
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Pipparda) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2028.
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal.
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023.
- Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka Tahun 2017, Badan pusat statistik Nusa Tenggara Barat.
- Richardson, J. I., & Fluker, M. (2004). *Understanding and managing tourism*. Pearson Education Australia.
- Darwanto, H., (2002). Prinsip Dasar Pembangunan Ekonomi Daerah.
- Riyadi., & Bratakusumah, D.S. (2004) *Perencanaan pembangunan daerah : strategi menggali potensi dalam mewujudkan otonomi daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sabon, V. L., Perdana, M. T., Koropit, P. C., & Pierre, W. C. (2018). Strategi Peningkatan Kinerja Sektor Pariwisata Indonesia Pada Asean Economic Community. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 8(2), 163-176. DOI:10.15408/ess.v8i2.5928.
- Sinaga, Supriono. (2010). Potensi dan Pengembangan Obyek Wisata di Kabupaten Tapanuli Tengah. Sumatra Utara: Kertas karya DIII pariwisata.
- Suwantoro, Gamal. (2004). *Dasar-Dasar Pariwisata*. Jakarta: Andi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

#### **PROFIL SINGKAT**

Aos Kuswandi, lahir di Sumedang 30 Juli 1969. Pendidikan sarjana pada Prodi Ilmu Pemerintahan UNPAD Bandung lulus tahun 1993. Kemudian Magister Ilmu Politik diselesaikan di UI pada tahun 2002. Doktor bidang Ilmu Pemerintahan dari



**JURNAL AGREGASI**  
**Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam**  
**Demokrasi**  
**Volume 8–Nomor 2, Desember 2020**



DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3817](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3817)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

---

UNPAD Bandung selesai tahun 2014.  
Sebagai dosen tetap pada Program Studi  
Magister Ilmu Pemerintahan Universitas  
Islam 45 Bekasi dan sebagai dosen tidak

tetap di Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Strata Satu UNIKOM Bandung.